



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 499/KEP/HK/2025

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2027

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menjaga pergerakan inflasi daerah pada tahun 2025 sampai dengan 2027 agar tetap berada pada tingkat yang stabil sesuai dengan target rentang sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$, perlu menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi di daerah;
- b. bahwa Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dengan berpedoman pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional Periode 2025-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2027.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melakukan upaya pengendalian Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : ...

- KETIGA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, di Kupang.
6. Anggota TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 499/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Desember 2025
TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2027

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2027

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
KETERJANGKAUAN HARGA (K1)	STABILISASI HARGA	1	Pasar Murah Bersubsidi di Tingkat Daerah Provinsi	5.016.366.000		Rp. 2.016.366.000 (Kab Kupang, TTS, Alor, Lembata, Ende, Manggarai, Sumba Timur dan Sabu Raijua	Tidak ada kegiatan Pasar Murah Bersubsidi	Rp. 3.000.000.000 (Kab TTS, TTU, Malaka, Flores Timur, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Rote Ndao)	Dinas Perindag
		2	Pemantauan Data Harga di Pasar Tradisonal di Kota Kupang	20.004.000		Rp. 20.004.000 (Pasar kasih naikoten, oebobo dan oeba)	Pasar kasih naikoten, oebobo dan oeba	Pasar kasih naikoten, oebobo dan oeba	Dinas Perindag
		3	Prognosa (Pendataan Stok Bapokting)	375.000.000		--	Rp. 75.000.000 (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Sikka, Ngada dan Sumba Timur)	Rp. 300.000.000 (22 Kab/Kota)	Dinas Perindag
		4	Pasar Murah		36.590.000	(tidak ada kegiatan)	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Dinas Perindag
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemantauan harga dan bapokting		31.306.000				Dinas Perindag
		6	Operasi Pasar BULOG			Pelaksanaan operasi pasar atas dasar penugasan (secara berkala dan insidentil pada periode tertentu)			PERUM BULOG
		7	Pelaksanaan SPHP Beras			38.574 TON	Menunggu penugasan pemerintah		PERUM BULOG
		8	Gerakan Pasar Murah (GPM)	-	90.000.000	Rp.90.000.000 (6 kali GPM di Kelurahan dalam Kota Kupang)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		9	Sidak pasar, monitoring pasokan, harga dan distribusi, di pasar, distributor, gudang dan pelabuhan	7.000.000		Minimal 6 kali setahun Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga			Biro Perekonomian dan AP
		10	Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan			Setiap hari melakukan pemantauan harga di pasar dan melaporkan ke Satgas pangan pusat dan pada pelaksanaan HLM di daerah			Dirkrimsus Polda NTT
KETERSEDIAAN PASOKAN (K2)	PENINGKATAN PRODUKSI DOMESTIK	1	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Provinsi	100.601.000		Rp.601.000 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tidak Tersedia Anggaran (Sesuai Alokasi Anggaran yang telah dibagikan)	Rp.100.000.000 (1 Peta)	Dinas Pertanian dan KP
		2	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Provinsi	111.677.000		Rp. 81.677.000 Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Tidak Tersedia Anggaran (Sesuai Alokasi Anggaran yang telah dibagikan)	Rp.30.000.000 (2 Dokumen)	Dinas Pertanian dan KP
		3	Sertifikasi Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	111.000.000		Rp. 1.000.000 Sertifikasi dan Rekomendasi Keamanan dan Mutu PAST Lintas Kab/Kota	Tidak Tersedia Anggaran (Sesuai Alokasi Anggaran yang telah dibagikan)	Rp.110.000.000 (2 Sertifikat)	Dinas Pertanian dan KP
		4	Promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (Pameran Pangan Lokal dan Budaya Hari Pangan Sedunia, Fasilitasi UMKM Pangan Lokal)	3.805.848.900		Rp. 1.674.664.880 Pameran 4 event (Zona I Timor-Rote-Sabu, Zona II Alor, Zona III Flores, Zona IV Sumba)	Rp.1.961.184.020 (2 event HPS sukses di Kab. Kupang dan Manggarai, 30 UMKM naik kelas dan promosi produk)	Rp. 170.000.000	Dinas Pertanian dan KP
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1.032.909.640		Rp.272.909.740 (Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari)	Rp.249.999.900 (Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari)	Rp.510.000.000 (Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari)	Dinas Pertanian dan KP

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		6	Pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi	1.632.743.400		Rp.843.743.400 (Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian)	Rp.250.000.000 (Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian)	Rp.539.000.000 (Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian)	Dinas Pertanian dan KP
		7	Perbanyak benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang (Cadangan benih Hortikultura)	6.983.642.500		Rp. 866.251.000 (Pengadaan Cadangan Benih hortikultura 14 Jenis Sayuran, Demotani sayuran 26 ha di Kab.Malaka, TTS dan Sumba Barat)	Rp.192.391.500 (Demotani sayuran di Kab. Belu, Malaka dan TTU)	Rp.5.925.000.000	Dinas Pertanian dan KP
		8	Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji atau benih (Pengembangan padi dan jagung, Demotani jagung, padi shorgum, kacang hijau, gerakan tanam/panen tanaman pangan/hortikultura, pengembangan jagung)	6.558.431.114		Rp.4.555.824.614	Rp. 1.807.606.500	Rp. 195.000.000	Dinas Pertanian dan KP
		9	Pengembangan Cabai			Tidak Ada Anggaran	5 Ha (anggaran belum tersedia)	Menunggu Alokasi Anggaran	Dinas Pertanian dan KP
		10	Pengembangan Bawang Merah			Tidak Ada Anggaran	5 Ha (anggaran belum tersedia)	Menunggu Alokasi Anggaran	Dinas Pertanian dan KP
		11	Pengembangan Tomat			Tidak Ada Anggaran	5 Ha (anggaran belum tersedia)	Menunggu Alokasi Anggaran	Dinas Pertanian dan KP

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		12	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura (Bimtek prasarana pengolahan hasil hortikultura)	688.088.140		Rp. 325.335.120 (Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan)	Rp. 128.753.020 (Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan)	Rp. 234.000.000 (Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan)	Dinas Pertanian dan KP
		13	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	7.816.808.000		Rp.3.216.808.000 (390 poktan pada 19 Kab/Kota)	Tidak Tersedia Anggaran	Rp.4.600.000.000 (460 Kelompok)	Dinas Pertanian dan KP
		14	Kelompok Masyarakat Yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan.		262.950.000	Rp.262.950.000 (3 Kelompok Masyarakat (Rumah Pangan B2SA)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		15	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan.		100.000.000	Rp.100.000.000 (Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		16	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman		67.000.000	Rp. 67.000.000 (Kota Kupang)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		17	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina		60.000.000	Rp. 60.000.000 (Fasilitasi dan Pembinaan)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		18	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan		10.000.000	Rp. 10.000.000 (Pengawasan Provinsi)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		19	Optimasi Lahan		166.911.374.000	Rp.166.911.374.000 (Perbaikan infrastruktur, penyusunan SID, seluas 28.723 ha di 22 Kab/Kota)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		20	Cetak Sawah		29.691.300.000	Rp.29.691.300.000 Konstruksi 500 ha, SID, Dokumen lingkungan,	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		21	Sertifikasi Benih Padi		224.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi, Analisa Mutu dan Standarisasi	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		22	Pola Pangan Harapan (PPH)		-	Tidak ada anggaran untuk penyusunan PPH	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		23	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Nasional dan Wilayah		158.670.000	Rp.158.670.000 (Dana terblokir)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		24	Pemantauan Distribusi dan Ketersediaan Pangan		-	Panel Harga Pangan (Pusat)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		25	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan		206.422.000	Rp.66.822.000 (Penguatan Cadangan Pangan Provinsi)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		26	Pengembangan Kios Pangan		25.000.000	Rp.25.000.000 (Dana terblokir)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		27	Penguatan Database Cadangan Pangan Nasional (Provinsi)		61.350.000	Rp. 61.350.000 (Dana terblokir)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		28	Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		50.000.000	Rp.50000000 (Peta FSVA Provinsi) (1 Dokumen)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		29	Sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan Beragam Berigizi Seimbang dan Aman (B2SA)		180.000.000	Rp.180.000.000 (Promosi B2SA)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		30	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut	6.500.000		Pendataan pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah laut s/d 12 Mil	Perairan 0 - 12 Mil di 6 Kabupaten dan 1 Kota	Perairan 0 - 12 Mil di 8 Kabupaten dan 1 Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		31	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	500.000		Pendataan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah darat lintas Kabupaten	5 Lokasi di 5 Kabupaten	7 Lokasi di 7 Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan
		32	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT-30 GT	11.500.000		5 Izin Usaha	10 Izin Usaha	15 Izin Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
		33	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	14.780.400		10 TDKP/eBKP tiap Kab dan Kota di NTT	30 TDKP/eBKP tiap Kab dan Kota di NTT	30 TDKP/eBKP tiap Kab dan Kota di NTT	Dinas Kelautan dan Perikanan
		34	Produksi Ikan Tangkap			185.000 Ton	195.000 Ton	200.850 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		35	Pengadaan Cool Box			40 Unit	50 Unit	55 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
		36	Pengadaan kapal 3 GT			65 Unit	65 Unit	70 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
		37	Pengadaan perahu ketinting			65 Unit	65 Unit	70 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
		38	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	1.500.000		5 Izin Usaha	10 Izin Usaha	15 Izin Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		39	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut s/d 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	10.000.000		5 Izin Usaha	10 Izin Usaha	15 Izin Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
		40	Jumlah benih kerapu			150.000 ekor	150.000 ekor	150.000 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
		41	Jumlah nener ikan bandeng			850.000 ekor	1.000.000 ekor	1.000.000 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
		42	Jumlah benih ikan air tawar			750.000 benih	1.000.000 benih	1.000.000 benih	Dinas Kelautan dan Perikanan
		43	Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) Lobster dan Kerapu			-	6 Unit di 6 Kabupaten	6 Unit di 6 Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan
		44	Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Daya Saing dan Pemberdayaan Usaha dalam Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan	1.100.000.000		Pendataan Potensi dan Peluang Pengembangan Pelaku Pengolahan dan Pemasaran	Pembinaan, Fasilitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran di 16 Kab/Kota	Pembinaan, Fasilitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran di 22 Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		45	Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.946.800		Pendataan Potensi dan Peluang Pengembangan Produk Hasil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Besar	Bimtek dan Penerapan Standar pada Usaha dan Produk Pengolahan dan Pemasaran di 16 Kab/Kota	Bimtek dan Penerapan Standar pada Usaha dan Produk Pengolahan dan Pemasaran di 22 Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		46	Pengawasan SDKP dibidang pengolahan	25.000.000		UPI (Unit Pengolahan Ikan) di Kota Kupang	UPI (Unit Pengolahan Ikan) di Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang	Dinas Kelautan dan Perikanan

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		47	Pengawasan SDKPdibidang pemasaran	25.000.000		Pasar ikan di Kota Kupang	Pasar ikan di Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang	Dinas Kelautan dan Perikanan
		48	Pengawasan SDKP dibidang Budidaya (perijinan usaha dan hasil produksi)	25.000.000		Kota Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang	Dinas Kelautan dan Perikanan
		49	Pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (UPTD Wilayah I)			Rp.547.321.913, (1) Produksi anakan babi untuk peternak, (2) Produksi daging babi	Rp.405.039.600, (1) Produksi anakan babi untuk peternak, (2) Produksi daging babi		Dinas Peternakan
		50	Pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (UPTD Wilayah II)			Rp.487.083.550 (1) Produksi anakan babi 300 ekor , (2) Produksi anakan sapi 10 ekor	Rp.0 (1) Produksi anakan babi 350 ekor , (2) Produksi anakan sapi 10 ekor	Rp.0 (1) Produksi anakan babi 350 ekor , (2) Produksi anakan sapi 10 ekor	Dinas Peternakan
		51	Pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (UPTD Wilayah III)			Reproduksi sapi	Rp. 66.000.000 (1) Reproduksi sapi	Reproduksi sapi	Dinas Peternakan
		52	Pengadaan Ayam KUB untuk kelompok tani ternak di daerah stunting	1.340.750.000		Rp. 1,340,750,000 ; untuk 96 kelompok di Kab. Sumba Barat, TTS, TTU (1 Kab 32 Kelompok; 1 kelompok 25 ekor ayam pulet dan pakan)	Rp.250,000,000 di Kab. Belu (ayam pulet dan pakan)	-	Dinas Peternakan
		53	Bantuan Kemasyarakatan : (per kelompok: 600 ekor ayam petelur, kandang ayam, pakan 3 bulan, Obat dan Vitamin)		5.374.320.000	28 kelompok (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Malaka, Lembata, Rote, Alor, Ende, Ngada)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Peternakan

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		54	Pertimbangan teknis rekomendasi penerbitan ijin pemasukan ternak (telur ayam dan daging ayam ras)			Jumlah pelaku usaha yang mengajukan ijin pemasukan telur ayam dan daging ayam ras	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan ijin pemasukan telur ayam dan daging ayam ras	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan ijin pemasukan telur ayam dan daging ayam ras	Dinas Peternakan
		55	Bantuan Pasang Baru Listrik Untuk Masyarakat Tidak Mampu (K2)	1.497.328.600		96,41	97,81%	98,54%	Dinas ESDM
		56	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	99.965.250		10 Laporan Imporan Implementasi Pergub NPA	10 Laporan Imporan Implementasi Pergub NPA	10 Laporan Imporan Implementasi Pergub NPA	Dinas ESDM
		57	Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dalam Mendukung Industri Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol Secara Berkelanjutan di Provinsi NTT		174.819.800	1 Dokumen (PPI Oeba dan PPI Hukung Lembata, PPP Tenau, Amagarapati, Kemalaputi, Tulandale)	-	-	BAPPERIDA
		58	Pemberdayaan Koperasi dalam mendukung hilirisasi Komoditi Sektor Kelautan dan Perikanan		176.103.000	1 Dokumen (Kab. Alor. Kabupaten Flores Timur dan Kab. Sumba Timur)	-	-	BAPPERIDA
		59	Hilirisasi Produk Unggulan/OVOP		156.664.000	-	1 Dokumen (Manggarai Timur , Sumba Timur, Lembata, TTU, TTS, Sikka, Kota Kupang)		BAPPERIDA
		60	Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat terhadap peningkatan PAD		145.553.800	-	1 Dokumen (Lokasi Kota Kupang, Rote Ndao dan Flores Timur)		BAPPERIDA

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		61	Pengemb dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder daerah Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan)	183.204.300	21.338.819.000	Luas Areal Irigasi Fungsional 2.000 Ha Pemeliharaan Daerah Irigasi 37.74%	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Dinas PUPR
		62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000		Luas Areal Irigasi Fungsional 2.000 Ha; Pemeliharaan Daerah Irigasi 37.74%; Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku 40%	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Dinas PUPR
		63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku)	5.876.473.254		Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku 40%; Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan 625,72 m3	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Dinas PUPR
		64	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	619.696.410	151.341.820	Pelatihan Kewirausahaan di Kota Kupang; Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Berbahan Lokal dan Ikan di Kab Lembata, Sikka, Ende; Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak di Kab Kupang	Pelatihan <i>Branding</i> dan Kewirausahaan di Kota Kupang; Pelatihan teknis pengolahan bahan/produk lokal di Kab Belu	Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Literasi Keuangan Kota Kupang, Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Berbahan Lokal dan Ikan di 22 Kota/Kabupaten & Pelatihan Pakan Ternak di TTU	Dinas Kop-UMKM
	PENGUATAN DAN PENGAWASAN CADANGAN PANGAN	1	Analisis Proyeksi Neraca Pangan		158.670.000	Rp.158.670.000 Penyediaan DATA PROYEKSI NERACA PANGAN (Anggaran terblokir)	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Menunggu Alokasi Anggaran dari Pusat	Dinas Pertanian dan KP
		2	Penyerapan beras dan jagung produksi masyarakat			6.232 Ton setara beras	Menunggu penugasan Pemerintah		PERUM BULOG

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPP)			18.000-20.000 Ton setiap bulannya	Menunggu penugasan Pemerintah		PERUM BULOG
		4	Pendistribusian Bantuan Pangan Pemerintah Berupa Beras (10 Kg/KPM)			Alokasi Juni - Juli 2025 : 605.291 PBP = 12.105.820 Kg Beras. Alokasi Juni - Juli 2025 : 653.746 PBP = 13.074.920 Kg Beras dan 2.614.984 Liter Minyak Goreng	Menunggu penugasan Pemerintah		PERUM BULOG
		5	Pendistribusian Bantuan Pangan Pemerintah Berupa Minyak Goreng				Menunggu penugasan Pemerintah		PERUM BULOG
KELANCARAN DISTRIBUSI (K3)	PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD)	1	Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (Provinsi lain) sebagai daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.			Melakukan 6 MoU/PKS	Melakukan 5 MoU/PKS	Melakukan 5 MoU/PKS	Biro Pemerintahan, Biro PAP, Bank Indonesia
		2	Memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah antara Kab/ Kota dalam Provinsi NTT			-	Jumlah KAD yang dilaksanakan di 22 Kab / Kota sesuai dengan kebutuhan		Biro Pemerintahan, Biro PAP, Bank Indonesia
	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN	1	Rehabilitasi Jalan	104.381.551.703	8.401.445.000	Panjang jalan yang direhabilitasi 10.99 Km	Panjang jalan yang direhabilitasi 100.77 Km	Panjang jalan yang direhabilitasi 100.77 Km	Dinas PUPR
		2	Rekonstruksi Jalan	11.596.914.260		Panjang jalan yang direkonstruksi 8.88 Km	Panjang jalan yang direkonstruksi 33.59 Km	Panjang jalan yang direkonstruksi 33.59 Km	Dinas PUPR
		3	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.855.410.482		Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 18.13 km	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 1,753.99 km	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 1,753.99 km	Dinas PUPR
		4	Rehabilitasi Jembatan	7.649.979.000		--	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi 2 Jembatan	Menunggu Program Prioritas Pemerintah	Dinas PUPR

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		5	Pengendalian dan Pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam Provinsi	53.398.900		Kota Kupang dan Kab. Kupang	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, Belu, Sikka, Sumba Timur, Manggarai	22 Kab/Kota	Dinas Perhubungan
		6	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota 1 Provinsi	391.482.610					Dinas Perhubungan
		7	Penerbitan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	59.394.900		Ketersediaan ijin bagi perusahaan bongkar muat dan ekspedisi di seluruh wilayah NTT			Dinas Perhubungan
		8	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5.574.129.900		Peningkatan fasilitas pelabuhan penyebrangan Aimere	Peningkatan fasilitas di pelabuhan penyebrangan Teluk Gurita	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyebrangan Aimere dan Teluk Gurita	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI EFEKTIF (K4)	MEMPERBAIKI KUALITAS DATA	1	Penyajian data PIHPS sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional (website PIHPS BI)			Publikasi	Evaluasi kesinambungan	Evaluasi dan pemanfaatan asesmen utk	Bank Indonesia
		2	Penyediaan data perkembangan IHK dan perkembangan IPH Mingguan			Informasi yang akurat yang dirilis BPS			BPS

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		SUMBER DANA		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
		3	Laporan harian Harga Bahan Pokok (SP2KP)			Setiap hari melakukan pemantauan, pencatatan harga di pasar dan melaporkan ke aplikasi SP2KP			Dinas Perindag
	MENGENDALIKAN EKSPEKTASI INFLASI	1	Menjaga tingkat inflasi NTT di kisaran sasaran Nasional. (Pemantauan inflasi melalui survei internal, survei BPS; koordinasi dengan pemda yang berpotensi mempengaruhi inflasi)			2,5±1%	2,5±1%	2,5±1%	Bank Indonesia
		2	Menyampaikan LAPID (Laporan Pengendalian Inflasi Daerah) dan Menyusun Laporan Perekonomian Provinsi NTT			Setiap Bulan dalam setahun			Bank Indonesia
		3	<i>Talkshow</i> Perkembangan Inflasi (Media elektronik, Media Sosial)			<i>Talkshow</i> Perkembangan Inflasi (Media elektronik, Media Sosial) minimal setiap bulan			Bank Indonesia
		4	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	15.765.200		Berita dan informasi publik minimal 1 kali dalam sebulan			Dinas Kominfo Prov NTT
		5	Pelayanan Komunikasi Virtual	19.000.000		Pelayanan virtual meeting minimal 1 kali dalam seminggu			Dinas Kominfo Prov NTT
		6	Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak/elektronik/meds os/videotron			Penyebaran informasi melalui media sosial minimal 2 kali sebulan berupa; Informasi harga pangan, belanja bijak, dan inflasi melalui Instagram BI NTT; Informasi belanja bijak melalui penyampaian adlips di RRI setiap hari Kamis; Digitalisasi informasi pangan melalui pemasangan panel/IED harga pangan			Biro Perekonomian dan AP, Bank Indonesia

4K	PROGRAM STRATEGI	KEGIATAN		sumber dana		TIMELINE TARGET			PIC
				APBD	APBN	2025	2026	2027	
	KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH	1	Peningkatan kehandalan TPID melalui <i>capacity building</i>			<i>Capacity Building</i> TPID se Provinsi NTT, minimal 2 kali dalam setahun; (Pada awal tahun bertujuan untuk pemantapan kapasitas TPID Provinsi dalam menjaga stabilitas nilai inflasi, sedangkan <i>Capacity Building</i> TPID akhir tahun difokuskan untuk evaluasi dan pemantapan kinerja)			Bank Indonesia
		2	<i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID			HLM TPID minimal 2 kali setahun menjelang HBKN			Biro Perekonomian dan AP
		3	RAKOR Mingguan Kemendagri			RAKORNAS mingguan Kemendagri, setiap minggu sesuai RDG dari Kemendagri			Biro Perekonomian dan AP
		4	Rapat Koordinasi Daerah			RAKORDA minimal 1 kali setahun			Biro Perekonomian dan AP
		5	Rapat Teknis			RATEK minimal 6 kali setahun			Biro Perekonomian dan AP
		6	Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan Pengendalian Inflasi			Pelaporan setiap minggu disampaikan ke Irjen Kemendagri			Inspektorat Daerah
		7	Penyusunan Roadmap TPID 2025 - 2027			Keputusan Gubernur NTT	--	--	Biro Perekonomian dan AP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001